



Regional Regulation No. 1 of 2021 Concerning Implementation of Gender Mainstreaming for the Sleman Regional Government

Sahid Supriyanto^{1*}, Vicki Dwi Purnomo², Syukron Abdul Kadir³, Benedictus Hestu Cipto Handoyo⁴

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

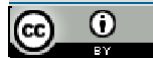
Keywords: Gender, Women, Mainstreaming

Received : 13 September

Revised : 17 October

Accepted: 21 November

©2022 Supriyanto, Purnomo, Kadir, Handoyo : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Gender is a process for ensuring that women and men have access to and control over resources, obtain development benefits and make the same decisions at all stages of the development process and all government projects, programs and policies (Inpres 9/2000 concerning PUG in National Development).). Gender equality in development policy is a significant indicator, because gender equality will strengthen a country's ability to develop, reduce poverty and govern effectively. The defense of women's rights began to take effect with the formation of WOMEN in DEVELOPMENT (WID) and is a solution to the problems of Third World women. However, after running for ten years, this program received strong criticism from feminist activists. Because it is considered as a propaganda tool for the First World Agenda to dominate Third World Countries. WID's main agenda is how to involve women in development activities. Because according to him the cause of backwardness of women is because they do not participate in development.

Perda No.1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutaman Gender Pemda Sleman

Sahid Supriyanto^{1*}, Vicki Dwi Purnomo², Syukron Abdul Kadir³, Benedictus Hestu Cipto Handoyo⁴

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Gender, Perempuan, Pengarusutaman

Received : 13 September

Revised : 17 October

Accepted: 21 November

©2022 Supriyanto, Purnomo, Kadir, Handoyo : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Pembelaan terhadap hak-hak perempuan mulai diberlakukan dengan terbentuknya WOMEN in DEVELOPMENT (WID) dan merupakan pemecahan masalah perempuan Dunia Ketiga. Namun setelah berjalan selama sepuluh tahun, program ini menuai kritik keras dari aktivis feminisme. Karena dianggap sebagai alat propaganda Agenda Dunia Pertama untuk mendominasi Negara Dunia Ketiga. Agenda utama WID adalah bagaimana melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan. Karena menurutnya penyebab keterbelakangan perempuan disebabkan mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan.

PENDAHULUAN

Pengarusutamaan Gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.

Kesepakatan global dalam merespon kesenjangan gender, yaitu : CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination against Women), yakni kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender (laki-laki dan perempuan), Beijing Platform of Action, yakni teridentifikasinya 12 bidang yang harus menjadi perhatian dalam pemajuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (antara lain kemiskinan, ekonomi, pengambilan keputusan, lingkungan hidup) dan Millenium Development Goals (MDG"s) : persamaan gender dalam pengertian kesetaraan dan keadilan gender ditetapkan sebagai salah satu dari delapan sasaran pembangunan MDG"s. Hal ini telah melahirkan pengarus-utamaan gender secara global.

Tujuan utama pengarusutamaan gender adalah mengagendakan secara eksplisit hal-hal yang menjadi masalah bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan saat penyusunan agenda dan intervensi pembangunan. Hal ini membuat agenda kesetaraan menjadi lebih eksplisit, tidak seperti kebijakan-kebijakan „universal“ yang diklaim telah mengagendakan secara implisit hal-hal yang menjadi kepentingan laki-laki dan perempuan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km² ini terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki jumlah penduduk 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km². Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat jumlah penduduk DIY mencapai 3.457.491 jiwa, dengan komposisi 49,43 persen laki-laki dan 50,57 persen perempuan. Penduduk tersebut tersebar di lima kabupaten/kota dengan populasi terbesar terdapat di Kabupaten Sleman dan diikuti oleh Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.

Untuk jumlah rumah tangga di DIY ada sebanyak 959.885 yang terdiri dari populasi laki-laki sebanyak 1.568.096 populasi perempuan sebanyak 1.588.133 jiwa, jumlah total penduduk 3.156.229 dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki sebanyak 20.037 jiwa (0,63%). Rasio yang berpendidikan, penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah juga lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan masing-masing untuk perempuan 19,92% untuk perempuan dan 8,35% untuk laki-laki. Sementara

itu, mengenai partisipasi anggota DPRD Provinsi DIY terhadap kesetaraan gender dalam proses pembangunan tergolong rendah. Pada dimensi kesetaraan gender dengan indikator partisipasi politik masih terbatas pada tataran wacana dan konsep belaka, pada implementasinya belum menunjukkan suatu tindakan yang benar-benar memberikan jaminan terwujudnya kesetaraan gender.

Jenis kelamin juga dapat mempengaruhi salah satu aspek yakni kekerasan secara gender yang disebabkan oleh bias gender atau gender related violence. Bahwa kekerasan ini terjadi akibat adanya ketidaksetaraan kekuatan di masyarakat, misalnya pemerkosaan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ vital, kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitusi), kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk sterilisasi atau pemasangan alat Keluarga Berencana (KB), kekerasan terselubung, pelecehan seksual. Pentingnya regulasi atau produk hukum yang mengatur kesetaraan gender dalam pemerintahan menjadi satu tugas penting. Dimana produk kebijakan terpenting yaitu Perda khusus untuk melindungi dan mengakomodir kepentingan perempuan sama sekali belum ada.

Pembelaan terhadap hak-hak perempuan mulai diberlakukan dengan terbentuknya WOMEN in DEVELOPMENT (WID) dan merupakan pemecahan masalah perempuan Dunia Ketiga. Namun setelah berjalan selama sepuluh tahun, program ini menuai kritik keras dari aktivis feminisme. Karena dianggap sebagai alat propaganda Agenda Dunia Pertama untuk mendominasi Negara Dunia Ketiga. Agenda utama WID adalah bagaimana melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan. Karena menurutnya penyebab keterbelakangan perempuan disebabkan mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural (Mansour Fakhri :8). Misalnya bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Terbentuknya perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksikan secara social atau kultural melalui ajaran keagamaan atau negara.

Kesenjangan gender di Indonesia masih relatif lebih besar dibanding negara ASEAN lainnya. Selain itu, tantangan lainnya adalah kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement). Persentase anggota parlemen wanita di Indonesia setelah periode tahun 2002-2003 mengalami kecenderungan meningkat. Tahun 2008, Indonesia menjadi negara yang persentase anggota parlemen wanita paling rendah, sedangkan Vietnam tertinggi. Angka partisipasi perempuan dalam pendidikan tingkat menengah di Indonesia pada tahun 2007 hanya sebesar 66.0 %, lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga ASEAN lainnya, sementara itu, Thailand telah mencapai 88.0%,

Malaysia 72.0%, dan Filipina mencapai angka 88.0%, meskipun demikian, ada peningkatan 6% dari tahun sebelumnya.

Angka partisipasi perempuan dalam pendidikan tingkat tinggi di Indonesia pada tahun 2007 meningkat 3% dibandingkan tahun 2006, tetapi terendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Caplan (1987) dalam *The Cultural Construction of Sexuality* mengatakan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekedar biologis, namun melalui proses social dan kultural. Oleh karena itu gender dapat berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin tidak. Oleh karena itu, diangkatlah penelitian ini dengan judul **“Perda No 1 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengarusutaman Gender Pemda Sleman”**

TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan konsep Gender di pemerintahan, namun tentunya dengan konsep, dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Chusnul Hayati (2006), dimana peneliti melihat Gender dan Perubahan Ekonomi : Peranan Perempuan Dalam Industri Batik di Yogyakarta 1900- 1965. Peneliti menemukan bahwa kemerosotan ekonomi di DIY pada abad ke-19 telah membuat perempuan mengambil posisi untuk pencari nafkah melalui kerajinan batik. Industri dan perdagangan batik telah memberikan peluang ekonomi bagi perempuan. Proses pembuatan batik tradisional/canthing lebih banyak membutuhkan tenaga kerja perempuan dari pada laki-laki. Beralihnya kegiatan yang bersifat non profit menjadi kegiatan yang bersifat komersial mengakibatkan banyak bermunculan industri-industri rumah tangga memproduksi batik. Dengan beralihnya batik menjadi hasil industri mendorong perbaikan ekonomi keluarga.

Sementara penelitian ke-dua yang dilakukan oleh Mufidah Ch (2007), dimana peneliti melihat Rekonstruksi Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam konteks Sosial, Budaya dan Agama. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan berbagai macam hal sosial terkait Bias Gender yakni Realitas ketidakadilan sosial di masyarakat, termasuk di dalamnya ketidakadilan gender terabaikan karena norma yang dibangun atas nama tafsir agama tidak dapat dipertemukan dengan realitas umat beragama. Bagi yang mempertahankan teks secara normatif, skripturalis akan terjebak pada sikap dualistik yakni, di satu sisi norma yang tidak boleh bergeser, di sisi lain realitas umat yang terus berkembang.

Penelitian ke-tiga yang dilakukan oleh Fahriah Tahar (2007), dimana peneliti melihat Pengaruh Diskriminasi Gender dan Pengalaman Terhadap Profesionalisme Auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profesionalitas auditor, sedangkan pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalitas auditor. Penelitian ke-empat yang dilakukan oleh Farida Hanum (2010), dimana peneliti mengkaji Analisis Kesenjangan Gender di Pemerintahan Kabupaten Sleman DIY. Perbedaan intensitas dan ekstensitas dalam mengarusutamakan gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan di K/L, provinsi, kabupaten/kota sehingga bias gender maupun netral gender masih mewarnai beberapa dimensi pembangunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia untuk mengintegrasikan isu gender kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, serta kurangnya komitmen para pemimpin K/L pemerintah dan daerah dalam pelaksanaan PUG.

Penelitian kelima oleh Yuni Lestari (2008) Persepsi dan Partisipasi Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kesetaraan Gender Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat dirangkum beberapa penelitian yang terkait dengan Gender dengan waktu penelitian mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2012. Penelitian yang akan dilakukan ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian yang telah digambarkan di atas. Selain melakukan penelitian terhadap implementasi Gender secara teknis. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif untuk menganalisa Pengaruh Pengarusutamaan Gender Internasional Terhadap Indonesia khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODOLOGI

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaahpustaka (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisanya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan hambatan yang ditemui.
2. Untuk mengetahui Implementasi Instruksi Presiden No 9 Tahun 1999 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan sosial terutama di Provinsi DIY.

Kontribusi Riset

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian dalam bidang Gender dan Politik terutama dalam pengembangan dan mengaplikasikan bidang Ilmu Hubungan Internasional,
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi sebuah masukan dan juga rekomendasi terhadap perkembangan Gender Internasional terutama dampaknya bagi negara dunia ketiga yakni Indonesia khususnya Provinsi DIY.

HASIL PENELITIAN

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan konsep Gender di pemerintahan, namun tentunya dengan konsep, dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Chusnul Hayati (2006), dimana peneliti melihat Gender dan Perubahan Ekonomi : Peranan Perempuan Dalam Industri Batik di Yogyakarta 1900- 1965. Peneliti menemukan bahwa kemerosotan ekonomi di DIY pada abad ke-19 telah membuat perempuan

mengambil posisi untuk pencari nafkah melalui kerajinan batik. Industri dan perdagangan batik telah memberikan peluang ekonomi bagi perempuan. Proses pembuatan batik tradisional/canthing lebih banyak membutuhkan tenaga kerja perempuan dari pada laki-laki. Beralihnya kegiatan yang bersifat non profit menjadi kegiatan yang bersifat komersial mengakibatkan banyak bermunculan industri-industri rumah tangga memproduksi batik. Dengan beralihnya batik menjadi hasil industri mendorong perbaikan ekonomi keluarga.

Sementara penelitian ke-dua yang dilakukan oleh Mufidah Ch (2007), dimana peneliti melihat Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam konteks Sosial, Budaya dan Agama. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan berbagai macam hal sosial terkait Bias Gender yakni Realitas ketidakadilan sosial di masyarakat, termasuk di dalamnya ketidakadilan gender terabaikan karena norma yang dibangun atas nama tafsir agama tidak dapat dipertemukan dengan realitas umat beragama. Bagi yang mempertahankan teks secara normatif, skripturalis akan terjebak pada sikap dualistik yakni, di satu sisi norma yang tidak boleh bergeser, di sisi lain realitas umat yang terus berkembang.

Penelitian ke-tiga yang dilakukan oleh Fahriah Tahar (2007), dimana peneliti melihat Pengaruh Diskriminasi Gender dan Pengalaman Terhadap Profesionalisme Auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profesionalitas auditor, sedangkan pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalitas auditor. Penelitian ke-empat yang dilakukan oleh Farida Hanum (2010), dimana peneliti mengkaji Analisis Kesetaraan Gender di Pemerintahan Kabupaten Sleman DIY. Perbedaan intensitas dan ekstensitas dalam mengarusutamakan gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di K/L, provinsi, kabupaten/kota sehingga bias gender maupun netral gender masih mewarnai beberapa dimensi pembangunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia untuk mengintegrasikan isu gender kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, serta kurangnya komitmen para pemimpin K/L pemerintah dan daerah dalam pelaksanaan PUG.

Penelitian kelima oleh Yuni Lestari (2008) Persepsi dan Partisipasi Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kesetaraan Gender Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat dirangkum beberapa penelitian yang terkait dengan Gender dengan waktu penelitian mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2012. Penelitian yang akan dilakukan ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian yang telah digambarkan di atas. Selain melakukan penelitian terhadap implementasi Gender secara teknis. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif untuk menganalisa Pengaruh Pengarusutamaan Gender Internasional Terhadap Indonesia khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kerangka Teori

1. Konsep Gender

Berdasarkan definisinya, konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Mansour Fakih :8). Misalnya bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Terbentuknya perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan atau negara. Ada beberapa teori tentang Gender yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Teori Fungsionalisme yang dicetuskan oleh Miriam Johnson. Ia mengakui bahwa adanya pandangan berat sebelah yang tak sengaja dalam teori Parson tentang keluarga dan kecenderungan fungsionalisme untuk meminggirkan masalah ketimpangan sosial, dominasi dan penindasan. Dalam pandangannya perempuan mengalami kerugian di dalam masyarakat karena pengaruh patriarki yang ada di dalam keluarga.
- b. Teori Konflik Anaitik yang menganalisis gender berdasarkan perspektif teori konflik yakni Janet Chafetz. Pendekatan yang dilakukannya lintas kultural dan historis dan mencoba merumuskan teori gender di dalam masyarakat dalam pola-pola khusus. Ia menyebutkan bahwa ketimpangan gender berasal dari stratifikasi jenis kelamin. Wanita mengalami kerugian paling sedikit jika dapat menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga dan kebebasan berperan dalam produksi ekonomi secara signifikan.
- c. Teori Sistem Dunia, dalam teori ini memandang kapitalisme global di seluruh fase historisnya sebagai sebuah sistem untuk dijadikan sasaran analisis sosiologi. Menurut Kathryn B. Ward sistem dunia tak dapat dipahami kecuali bila tenaga kerja rumah tangga dan sektor informal diperhitungkan dalam analisis dan karena proporsi wanita banyak terdapat di kedua sektor tersebut maka wanita perlu mendapat perhatian khusus.

Menurut Riant Nugroho (2008) gerakan kaum perempuan pada hakekatnya adalah gerakan transformasi dan bukanlah gerakan untuk membalas dendam kepada kaum lelaki. Artinya gerakan transformasi perempuan adalah suatu proses pergerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia (laki-laki dan perempuan) agar lebih baik dan baru yang meliputi hubungan ekonomi, politik, kultural, ideologi, lingkungan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu pandangan kritis juga dinyatakan oleh Hillary M.Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex&Gender*, yang mendefinisikan bahwa gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectation for women and men).iii Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Dimana ada dua elemen yang mendasar yakni gender tidak identik dengan jenis kelamin dan gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat (Gallery,1987).

Upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan di Indonesia telah dilakukan lebih dari satu dasarwarsa. Terbitnya INPRES No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menjadi satu titik tolak kebijakan yang sangat penting dalam mendorong upaya tersebut. Kebijakan ini kemudian dipertegas juga dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2011 tentang RPJMN 2010-2014 yang menetapkan gender sebagai salah satu isu lintas bidang yang harus diintegrasikan dalam semua bidang pembangunan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) menjadi satu lembaga yang diharapkan berperan penting dalam mendukung keberhasilan upaya tersebut melalui fungsi koordinasi, advokasi dan fasilitasi yang dimilikinya.

Sejak beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan banyak upaya mendorong implementasi Anggaran yang Responsif Gender (ARG), yang dimulai dengan dikeluarkan PMK 109/2009 dengan tujuh kementerian negara/lembaga sebagai pilot di dalam melaksanakan ARG di tahun 2010. PMK 109/2009 diperbarui dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.104/PMK 02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2011 dengan fokus pelaksanaan ARG di sektor-sektor ekonomi, politik dan sosial. Perencanaan yang responsif gender dilakukan dengan memasukkan perbedaan pengalaman, spirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Kiritikan terhadap wanita secara sosial berakar pada sektor domestik, yakni institusi keluarga. Sama juga halnya dengan teori yang disampaikan oleh Socrates untuk menghilangkan keluarga konvensional. Seorang pemikir feminis teoritis awal Jhon Stuart Mill pada tahun 1869 mengemukakan bahwa pekerjaan perempuan di sektor domestik, sebagai pekerjaan yang irasional, emosional dan tiranis.

PEMBAHASAN

Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Pada Konferensi Perempuan IV di Beijing tahun 1995, Platform of Action secara tegas para partisipan mendukung konsep gender mainstreaming dengan menyatakan bahwa pemerintah dan para pengambil keputusan harus terlebih dahulu secara aktif mempromosikan rencana kebijakan- kebijakan dan program yang berspektif gender. Dan mengintegrasikan kebijakan gender dalam empat tahap manajemen yang berkesinambungan yaitu organisasi dan lembaga perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari tingkat

nasional, propinsi, hingga kabupaten/kota secara berkelanjutan. Permasalahan Gender menjadi sebuah kajian yang sangat menarik, dimana didalamnya ada beberapa ciri yang dilakukan untuk Mengidentifikasi Isu Strategis Gender, yakni :

- a. Menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan
- b. Adanya ketimpangan kondisi (perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol, manfaat) antara laki-laki dan perempuan
- c. Adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan: diskriminasi, marginalisasi, subordinasi (bentuk dan akibat yang ditimbulkan)
- d. Ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur eksternal dan internal pemerintah)
- e. Cakupan luas (dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat)
- f. Mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan
- g. Efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain)
- h. Berorientasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-laki dan perempuan.

Anggaran Responsif Gender(ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. vi Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber- sumberdaya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Perspektif Feminis terhadap Gender

Didalam Hubungan Internasional, gerakan feminisme berkembang semakin pesat. Dimana gerakan ini menuntut secara de facto hak-hak wanita untuk lepas dari penindasan dan ketidakadilan. Feminisme adalah pendekatan akademis yang melihat melalui lensa gender untuk memahami lebih jauh tidak hanya tentang perempuan dan gender, tetapi juga bagaimana perempuan dan gender mampu menolong untuk mempelajari lebih luas tentang dunia secara umum. Didalam feminisme ada banyak aliran yang berkembang, yakni

- a. Feminis Liberal yang menyatakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender akan bisa dicapai dengan menghapuskan hambatan yang bersifat regulatif, yang membedakan hak laki-laki perempuan.
- b. Feminis Konstruktivis berfokus pada gender sebagai gagasan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh politik internasional.
- c. Feminis Post-Strukturalis fokus kajiannya pada konstruksi performatif dan linguistik serta bagaimana relasinya dalam gender.

- d. Feminis Post-Modern secara kritis menginvestigasi kategori yang dianggap natural alamiah seperti kategori perempuan dan gender, serta bagaimana kategori-kategori tersebut dipetakan dalam politik global.
- e. Feminis Post-Kolonial mengkaji secara kritis bagaimana karakter/nuansa dari dominasi dan subordinasi dibawah imperialisme dan kolonialisme.

Banyak ditemukan ketidakadilan pada kaum perempuan, yakni terjadinya pemiskinan terhadap kaum perempuan, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu, kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, perempuan mendapat beban kerja lebih banyak. Hal ini sejajar dengan teori Marx yang mengatakan bahwa kekuasaan adalah identik dengan tiran, dan perempuan juga harus meraih kebahagiaan. Standarnya adalah kebahagiaan materialistis maskulini, yaitu standar yang bersumber pada dunia publik dan aspek rasionalitas manusia. Feminisme awalnya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta merupakan usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut.

Feminitas adalah ideologi yang berciri kedamaian, keselamatan, kasih dan kebersamaan. Sedangkan maskulinitas memiliki karakter persaingan, dominasi, eksploitasi dan penindasan. Bagi feminis Marxis penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi, sehingga persoalan perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme. Engels menganggap bahwa terpuruknya status perempuan bukan karena perubahan teknologi, melainkan karena perubahan organisasi kekayaan. Gerakan feminis muncul di Amerika sebagai bagian dari kultur radikal termasuk gerakan hak-hak sipil dan kebebasan seksual.

Gerakan ini menggema pada tahun 60-an hingga menjalar sampai ke Eropa, Kanada dan Australia. Golongan liberalis berasumsi bahwa kebebasan dan keadilan berasal dari rasionalitas dan perempuan juga sebagai makhluk yang rasional. Dan penyebab ketidak mampuan kaum perempuan bersaing dengan laki-laki akibat rasionalitas yang rendah. Sementara kaum radikal beranggapan bahwa penindasan terhadap perempuan adalah akibat dominasi kaum laki-laki. Feminisme telah membawa perubahan positif bagi perempuan terutama di dunia politik. Pengarusutamaan Gender di Provinsi DIY dilaksanakan dengan melakukan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari :

1. Perencanaan
2. Penyusunan
3. Pelaksanaan
4. Pemantauan
5. Evaluasi

Untuk dapat mengambil kebijakan dalam proses pembangunan. Hambatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi DIY adalah :

1. Minimnya ketersediaan data pilah
2. Pemahaman yang belum merata terhadap PUG-ARG-GBS-GAP dll.

3. Metode/tools monitoring dan evaluasi yang masih sangat minim.
4. Belum dirasakannya secara nyata manfaat PPRG dalam penajaman kualitas perencanaan, penganggaran, dan perbaikan layanan publik.
5. Belum optimalnya efektifitas koordinasi kelembagaan PPRG

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berbagai memori kolektif yang menunjukkan perempuan, pertama-tama adalah simbol kemakmuran, sebagaimana tampil dalam cerita Dewi Sri dalam masyarakat Jawa. kedua adalah simbol Kekuasaan, sebagaimana tampil dalam personifikasi Nyi Roro Kidul, yang diidentifikasi sebagai ratu dunia 'halus dan mistis' yang menguasai laut Selatan Jawa, dan memiliki peran kosmik dalam masyarakat Jawa, yang diyakini berjenis kelamin perempuan. Dua deskripsi ini memberi gambaran awal bahwa dalam kehidupan nusantara, isu kepemimpinan perempuan bukanlah sesuatu yang baru. Perempuan telah memiliki legitimasi historis maupun kultural untuk memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan posisi kepemimpinan dalam kehidupan publik, dan memiliki peran sentral dalam pengaturan tata kehidupan bersama diranah publik. Selain itu dalam tradisi masyarakat pedesaan di Jawa, nyata bahwa perempuan mendapatkan tempatnya yang khas dalam soal kepemimpinan.

Lihatlah dalam kehidupan petani, laki-laki dan perempuan berbagi peran sangat sempurna, dan tidak cenderung berada dalam posisi konflik dan konfrontatif. Jika sang laki-laki mencangkul dan menggemburkan tanah, menanam sampai menuai padi perempuan justru mendapat tempat yang utama. Dalam perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat Nusantara, berkembangnya bandar-bandar Islam, semakin lama mulai memunculkan berbagai pembatasan terhadap kaum perempuan. Apalagi ditemukan bukti muncul fatwa dari 'ulama Makkah bahwa kepemimpinan perempuan dilarang dalam Islam, semakin menyudutkan posisi perempuan. Padahal dalam kenyataan di era sebelumnya, perempuan mendapatkan posisi yang setara dalam soal kepemimpinan. Apalagi fakta hukum waris Islam, memberikan posisi istimewa pada kaum laki-laki, semakin menyudutkan akses perempuan pada masa-masa itu.

Perkembangan Kekinian Gerakan Perempuan

Perkembangan penafsiran agama mutakhir, serta perkembangan nilai global menunjukkan bahwa dorongan atas kesetaraan posisi perempuan semakin disuarakan dalam berbagai ruang kehidupan. Era Kartini, oleh penguasa kolonial dianggap suatu momentum di mana perempuan berupaya mengemansipasi diri. Walaupun domestifikasi perempuan dalam kehidupan sosial di Indonesia pernah menghadapi tantangan pada Era Orde Baru. Dan pada masa selanjutnya itulah peran perempuan di ranah publik sampai soal kepemimpinan, menjadi diskursus yang dibicarakan dari panggung politik dan panggung budaya. Hingga kemudian muncul suatu Keputusan Presiden di era KH Abdurrahman Wahid tentang Pengarusutamaan Gender yang semakin memberi peluang bagi penguatan posisi perempuan dalam proses pembangunan, dan seluruh tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat masa kini. Era kepemimpinan politik sesudahnya, menunjukkan bahwa perempuan

mendapatkan tempat yang luas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah saat ini, membuka jalan seluas-luasnya bagi perempuan untuk memainkan peran ekonomi, sosial dan politiknya dari lokus paling kecil yakni keluarga. Bahkan untuk beberapa bidang ekonomi tertentu justru perempuan mengambil porsi yang cukup besar. Namun demikian program pemberdayaan, tidak boleh hanya bertumpu pada aspek pemberdayaan ekonomi dan politik semata, namun lebih dari itu mampu merepon tantangan kebudayaan yang lebih luas. Dan oleh karena itu, gerakan pemberdayaan perempuan dimasa yang akan datang, tidak boleh berkuat pada isu elit dan konfrontatif, misalnya isu kepemimpinan politik, kuota 30% Pengurus Parpol, isu sejenisnya. Harusnya sudut pandang kita mulai peka terhadap kenyataan yang lebih mikro, misalnya fakta lemahnya institusi keluarga dalam pewarisan nilai, eksploitasi perempuan 'atas nama kecantikan' oleh media massa, peran perempuan dalam mencegah demoralisasi.

PENELITIAN LANJUTAN

Kami berharap penelitian selanjutnya lebih sempurna dan lebih bisa mengkaji terkait pengarusutaman wanita.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk dosen dan rekan rekan Magister Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam kehidupan Politik Di Indonesia. *Jurnal Hawa*, 157.
- Hamdi, M. (2015). *Kebijakan publik : Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, M. (2017). *Perencanaan Pembangunan*. Makasar: CV. Dua Bersaudara.
- Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurhayati, & Yasir, M. (2019). Imolementasi Peraturan Walikota Batam No.07 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Batam Tahun 2016. *Jurnal Trias Politika*.
- Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan Publik*.
- Rizalul Fikri, R. N. (2015). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Reformasi. Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute (SSDI).
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA. Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitati, Kualitatif, dan R&D*.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan ModelModel Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wiasti, N. M. (2017). *Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender*. Sunari Penjor.
- <https://geotimes.id/opini/akar-kearifan-lokal-gerakan-perempuan-dinusantara/>